

PERGERAKAN PEJUANG PEREMPUAN DI KOTA MAKASSAR PASCA KEMERDEKAAN 1945-1960

Burhanuddin dan Ilham Daeng Makkelo

Departemen Ilmu Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Hasanuddin

burhanuddin737777@gmail.com

ABSTRACT

This research aims to explain the dynamics of the women's movement in Makassar City after the Indonesia Proclamation of Independence (1945-1960). During the physical revolution, women participated in the battlefield by involving themselves as nurses, taking care of public kitchens, and being active in the army. Once Indonesia received recognition of sovereignty, women began to form and develop various organizations that were active in the social, economic, educational, cultural, and political fields. In Makassar, female figures such as Emmy Saelan, Siti Mulyati Hasyim, Salawati Daud, and Milda Mathilda Towoliu were recognized. By 1955, some of them were actively involved in the Indonesian parliament. This research relies on historical research by tracing static archives, magazines, and newspapers of the time along with related literature. The research found that the experience during the physical revolution, followed by the regional upheaval in the 1950s, became the background for the women's ideas of unity and love for the motherland, involving themselves in politics in Makassar.

Keywords: *Equality movement; Women heroes; Makassar City.*

PENDAHULUAN

Gerakan perempuan di Indonesia bukan merupakan gejala kontemporer. Sepanjang sejarahnya, Indonesia mengenal tokoh-tokoh perempuan yang telah turut aktif dan mewarnai perjalanan sejarah bangsa ini. Nama-nama seperti Laksamana Malahayati, Cut Nyak Dien, Cut Meutia, Martha Christina Tiahahu, Colliq Pujie, Besse Kajuara, dan Opu Daeng Risadju, telah dikenal secara luas sebagai tokoh perempuan yang berasal dari periode jauh sebelum kemerdekaan Indonesia. Pada zamannya, mereka memegang posisi penting baik secara politik maupun militer di daerah masing-masing. Corak lingkup perjuangan perempuan mulai berubah pada abad ke-20 dengan hadirnya tokoh R.A Kartini yang berusaha mendorong terbukanya akses pendidikan kaum

wanita Jawa. Sejak saat itu, organisasi perempuan pun kian marak, terutama setelah tahun 1928. Salah satu perkumpulan perempuan paling awal adalah Persatoean Perempuan Indonesia (PPI) yang dibentuk pada 1928. Seperti semangat Kartini, mereka menyuarakan reformasi pendidikan dan reformasi perkawinan. Mereka berganti nama menjadi Perikatan Perhimpunan Istri Indonesia (PPII) dan organisasi Istri Sedar (1930) yang masih tetap menyuarakan anti poligami dan perceraian. Tahun 1942, Pemerintah Jepang membentuk organisasi *Fujinkai* (Barisan Wanita) yang memiliki tujuan yakni memperjuangkan pemberantasan buta huruf dan berorientasi pada pekerjaan sosial.

Latar belakang keterlibatan perempuan dalam gelanggang sejarah Indonesia ini kemudian terus berlanjut ketika revolusi pecah antara 1945-1949. Saat itu, Perempuan mengambil peran penting dengan melibatkan diri pada pergerakan fisik. Salah satunya ialah Emmy Saelan bersama dengan rekan-rekannya menentang pembantaian Westerling yang menjadi satu bencana kemanusiaan di Makassar selama revolusi.¹ Pergerakan selanjutnya yakni; Siti Mulyati Hasyim yang merupakan tokoh perempuan yang memulai pergerakannya sebagai ketua Laskar Wanita Lapris yang bertugas dan bertanggung jawab untuk menyelidiki kegiatan-kegiatan musuh. Setelah pengakuan kedaulatan, mereka secara aktif berkecimpung dalam organisasi sosial dan politik yang berorientasi pada bidang agama, pemerintahan, hukum, seni budaya, kesehatan, ilmu pengetahuan, media massa, ekonomi dan juga kesejahteraan sosial.

Tahun 1950-1965, pergerakan perempuan di Makassar lebih dipusatkan pada upaya pemberdayaan kaum perempuan dalam bidang politik, ekonomi, pendidikan, sosial dan kebudayaan. Sehingga posisi perempuan tidak lagi menyandang status golongan kedua dalam masyarakat. Perjalanan politik di Sulawesi Selatan, Salawati Daud merupakan salah satu tokoh perempuan yang aktif dalam kampanye pasifikasi yang diberlakukan oleh pemerintah Belanda. Pada tahun 1950 Salawati Daud telah terlibat dalam pembentukan organisasi perempuan nasional bernama Gerakan Wanita Sedar (GERWIS). Di samping Salawati Daud, juga dikenal seorang tokoh perempuan yang separtai dengannya di Partai Kedaulatan Rakyat (PKR), yakni Milda

¹ Irmawati Puan Mawar “*Emmy Saelan Perempuan di Palagan*” Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, hlm.1-5.

Mathilda Towoliu.² Dinamika pergerakan perempuan seperti yang ditampakkan oleh tokoh-tokoh perempuan perlu ditelusuri lebih jauh. Sebab periode 1945-1950 merupakan tahun-tahun penuh kekacauan yang narasinya masih didominasi oleh bahasan mengenai peran laki-laki. Sementara periode 1950-1960, dapat dikatakan sebagai periode kebangkitan pergerakan perempuan di Makassar.³ Maka tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan kondisi gerakan perempuan di Indonesia dalam revolusi fisik hingga keterlibatan mereka dalam parlemen dan politik baik di Makassar maupun di Sulawesi Selatan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode sejarah yang data-datanya diperoleh dari penelusuran sumber-sumber primer dan sekunder. Beragam laporan sezaman seperti yang dikeluarkan oleh Kementerian Penerangan, Kementerian Pertahanan, serta laporan politik tahun 1950-an memberikan gambaran berharga mengenai eksistensi organisasi perempuan pada periode yang diteliti. Kegiatan mereka pun banyak terekam oleh surat kabar dan majalah sezaman. Semuanya menjadi bahan penting yang dapat menunjang tujuan penelitian ini. Jurnal dan tesis dengan tema serupa juga digunakan dalam penelitian ini sebagai sumber sekunder. Semua bahan tersebut kemudian diverifikasi secara kritis untuk memperoleh data-data kredibel. Data-data tersebut diinterpretasi untuk memperoleh satu penjelasan sejarah.

PEMBAHASAN

Bangkitnya Pergerakan Perempuan Di Makassar Pada Masa Perang Revolusi

Periode perang revolusi tahun 1945-1949 merupakan periode penting bagi sejarah Republik Indonesia, di Sulawesi Selatan khususnya di Makassar, rakyat bangkit untuk menyusun kekuatan, karena sekutu memberi kesempatan kepada NICA (Netherland Indies Civil Administration) mempersenjatai bekas KNIL (Koninklijk Netherland Indisch Leger) yang pernah disekap oleh Jepang (Awal Oktober 1945).

² *Madjallah Karya*, 1945, hlm.20.

³ Dias Pradadimara, M. Bahar Akkase Teng, Heri Kusuma Tarupay. *Negara Masyarakat Sulawesi Selatan di Tahun 1950-an*. (Jakarta: PT. Kansius, 2014), hlm.184-185.

Perang revolusi memberikan dampak yang cukup banyak terhadap kehidupan kaum perempuan, hal itu ditandai dengan banyaknya kaum perempuan yang terseret dalam perang revolusi menjadi korban, kehilangan suami, kematian tunangan, atau bahkan kehilangan anaknya, tidak dapat dihitung pula berapa banyak yang mati di pengungsian, mati kelaparan karena disia-siakan oleh suaminya yang ikut pula terseret dalam perang revolusi.⁴ Tidak sedikit anak-anak gadis yang tercemar kehormatannya, proses demoralisasi di zaman revolusi yang sangat hebat menyerang kehidupan para pemuda dan pemudi, sehingga tidak sedikit penderitaan, pengorbanan dan kesedihan yang telah dialami oleh kaum perempuan pada masa perang revolusi.

Masa peran revolusi menjadi awal perjuangan kaum perempuan di Makassar pasca kemerdekaan, organisasi—organisasi perempuan mulai bermunculan yang mengutamakan usaha-usaha perjuangan, baik di garis belakang dengan mengadakan dapur umum dan pos-pos Palang Merah, maupun di garis depan (pergerakan fisik) dengan nama suatu badan perjuangan maupun bergabung dengan organisasi-organisasi lain, memperjuangkan masalah perkawinan, pendidikan, upah buruh dan bahkan dalam membangun bangsa yang adil dan makmur sesuai dengan cita-cita kemerdekaan Indonesia.

Saat itu tokoh-tokoh perempuan tampil dengan mendirikan organisasi perempuan atau bergabung dalam laskar, seperti Siti Mulyati Hasyim dengan pasukan wanitanya, Emmy Saellan dengan aktifitas dalam kepalangmerahan, Ruaidah dengan Devisi Melati yang bergabung dalam kelaskaran Kris Muda Mandar, Salawati Daud yang aktif dalam organisasi perempuan maupun aktif dalam bidang Pers bersama dengan Ny. Towoliu. Tampak nyata dalam pergerakan perempuan sejak tahun 1945 mulai bangkit secara perlahan.

Pada bulan September 1945 tanggal 17 lahir Panitia Wanita Penolong Sosial yang diketuai oleh Ibu Dr. Ratulangi. Pada akhir tahun 1946 organisasi ini menjelma menjadi Perkumpulan Wanita Penolong Sosial (PWPS) dengan jumlah anggota 2.000 orang. Selanjutnya lahir Persatuan Wanita Maluku diketuai oleh Ny. Pattileuw (10-11-1946), Percintaan Ibu Kepada Anak Temurunnya (PIKAT) yang dipelopori oleh Nj. Antoinette Waroh (23-3-1947), Persatuan Wanita Suku Toraja dari Nj. Pesumah (13-10-1947). Lapangan usaha organisasi-organisasi tersebut ialah

⁴ *Madjallah Karya*, 1945.

mendirikan sekolah-sekolah, asrama-asrama, disamping kursus-kursus masak dan menjahit, pengetahuan umum. GOWANI misalnya mempunyai Sekolah Kepandaian Putri dengan rumah yatim yang diberi nama “Murni”.⁵

Tokoh Pergerakan Perempuan di Kota Makassar 1945-1960

1. Emmy Saelan: Pejuang Perempuan yang Gugur dalam Perjuangan

Periode perjuangan fisik dalam menggapai kemerdekaan Indonesia masih terus bergolak dan mengundang para tokoh pemuda-pemudi untuk terlibat dalam garis depan untuk mengangkat senjata. Perjuangan di Sulawesi Selatan khususnya di Makassar kita mengenal seorang tokoh perempuan yang memiliki jiwa patriot yang tinggi, tokoh perempuan tersebut adalah Emmy Saelan yang lahir di Makassar, 15 Oktober 1924. Emmy merupakan anak sulung dari Saelan (pegawai Kota praja Makassar).

Masuknya Belanda yang diboncengi oleh sekutu membuat kondisi Makassar kembali bergolak. September 1945, tentara KNIL melakukan penembakan terhadap masyarakat yang berkerumun di sekitar jalan Sungai Cerekang, Jalan Bulusaraung, dan Jalan Poso. Tindakan ini mengundang reaksi keras pemuda-pemudi di Makassar. Mereka melempari tangsi-tangsi KNIL dengan batu merah. Bentrokan pun terjadi sehingga banyak pemuda terluka parah dan dilarikan ke rumah sakit Stella Maris. Emmy Saelan yang saat itu menjadi salah satu perawat dan bertugas memberikan bantuan obat-obatan dan kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan oleh korban.

Pekerjaannya sebagai perawat membuat Emmy sering terlibat dalam pengiriman obat-obatan untuk para pejuang. Kontaknya dengan laskar membuat Emmy memutuskan untuk terlibat dalam pertempuran di garis depan. Selain bertindak sebagai perawat di medan perang Emmy juga sering memberikan informasi-informasi (Intel) mengenai gerakan patroli Belanda kepada pemuda dan laskar pejuang yang masih mengadakan gerakan. Selain itu Emmy juga bertindak sebagai penghubung antara pemuda yang berada dalam tahanan dengan pemuda yang berada di luar sehingga hubungan dan komunikasi untuk mengatur siasat tetap terpelihara dan berjalan lancar.

⁵ Arsip Kementerian Penerangan Republik Indonesia, *Provisi Sulawesi*, Makassar, 1953.

Ketika eskalasi konflik antara tentara Belanda dengan pejuang yang tergabung dalam laskar kian memuncak, Belanda mendatangkan ‘*Speciale Troopen*’ yang dipimpin Raymond Pierre Westerling. Situasi perjuangan yang gawat di dalam kota memaksa para pejuang mundur ke Polongbangkeng. Pada momen itulah Emmy Saelan meninggalkan tugasnya sebagai perawat dan bergabung ke dalam rombongan pejuang menuju Polongbangkeng. Emmy Saelan diberikan amanah sebagai Kepala Palang Merah atau perwira kesehatan dan mengurus dapur umum. Ketika LAPRIS dan TRIPS berencana menyerang Makassar, Emmy Saelan diberikan tugas menjadi mata-mata untuk menyelidiki posisi KNIL di Makassar.

Pada tanggal 21 Januari 1947, Pesawat tempur Belanda berhasil mengidentifikasi gerakan anggota laskar yang dipimpin oleh R.W Monginsidi. Emmy Saelan saat itu diberi tugas untuk memberi pertolongan pertama pada pejuang yang terluka dalam penyerangan tersebut. Emmy Saelan memerintahkan agar mereka yang terluka dibawa ke daerah Kassi-Kassi atau Tidung yang tidak jauh dari pusat kontak senjata. Namun, pasukan tentara KNIL/NICA dari Pandang-Pandang dibantu dengan pasukan Paccallaya mengepung pasukan Emmy Saelan di dalam kampung tersebut. Tidak lama kemudian terdengar suara tembakan pistol yang disusul letusan granat tangan yang diledakkan oleh Emmy Saelan sehingga merenggut nyawanya sendiri. Mereka yang menyaksikan tindakan Emmy Saelan berhasil kembali ke induk pasukannya untuk melaporkan peristiwa-peristiwa tersebut.

2. Siti Mulyati Hasyim: Pemimpin Laskar Wanita di Kota Makassar

Siti Mulyati Hasyim lahir di Mandar, 4 Juni 1927. Ayahnya bernama Muhammad Hasyim, ia merupakan anak bungsu dari tiga bersaudara. Ayahnya tampak cukup terpengaruh oleh atmosfer pergerakan awal abad 20. Ia memberi gambaran mengenai pendidikan dan cara pandang nasionalis pada anak-anaknya. Semasa remaja, Siti Mulyati ikut dalam organisasi kepanduan dan Palang Merah. Ketika revolusi pecah, ia menjadi ketua Laskar Wanita LAPRIS yang tugasnya menyelidiki kegiatan musuh. Dalam organisasi ini, beberapa tokoh perempuan juga turut serta, seperti Aminah, Nursiah, bahkan Emmy Saelan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Siti Mulyati dibantu oleh Emmy Saelan untuk melancarkan taktik penyamaran agar dapat menyusup masuk ke dalam tangsi-tangsi Belanda di

Kota Makassar untuk menghimpun kaum perempuan. Selain itu Siti Mulyati bersama dengan rekan-rekannya mendapatkan tugas tambahan untuk membentuk pasukan perempuan agar sedapat mungkin bekerja sama dengan pasukan pemuda untuk melakukan perlawanan terhadap sekutu di Kota Makassar. Ia kerap menyamar sebagai seorang pengantar pesakitan yang diperankan Aminah untuk mencapai daerah Polongbangkeng. Mereka menyelipkan dokumen dalam pakaian mereka, dan menyelundupkan senjata di bawah dokar tumpangnya. Dokumen dan persenjataan yang berhasil diloloskan dibagikan kepada masing-masing anggota di Polombangkeng.

Pergolakan yang terjadi membuat Siti Mulyati kerap terlibat dalam sejumlah penyerangan. Ia juga tergabung dalam PPNI dan Laskar Wanita Indonesia. Ketika ia tertangkap oleh pasukan Westerling di Pandang-Pandang, Siti Mulyati dimintai keterangan terkait gerakan pejuang di Makassar. Namun ia menolak memberi keterangan. Setelah lima hari ditahan, ia dipindahkan ke kantor polisi di Datu Museng. Lalu dipindahkan lagi ke Stan MP untuk disiksa bersama rekannya R.W Monginsidi. Ia dianggap hendak melindungi pelarian Monginsidi. Namun, pada tahun 1949, Siti Mulyati akhirnya dibebaskan.

Setahun kemudian, pecah pemberontakan Andi Aziz. Siti Mulyati kembali ditahan selama dua bulan. Saat itulah ia ikut dalam penyerangan laskar Harimau Indonesia terhadap pasukan KNIL. Siti Mulyati kemudian menikah dengan Rusman Kusuma Djaya yang berpangkat pangkat Letnan Dua. Tampak perjuangan Siti Mulyati Hasyim pada tahun 1945-1949 merupakan perjuangan yang sangat besar dalam mempertahankan kemerdekaan. Beliau menutup usia pada Kamis, 26 April 2001.

3. Salawati Daud dan Pencarian Identitas Diri Bangsa

Jika pergerakan perempuan pada masa revolusi lebih menitik beratkan kepada perjuangan fisik di garis depan menghadapi pendudukan kembali tentara Belanda, maka pada masa pergerakan mencari identitas diri bangsa lebih difokuskan gerakan politik. Setelah pengakuan kedaulatan, dekade 1950-an memperlihatkan bagaimana kaum perempuan mulai melibatkan diri dalam politik parlemen di Sulawesi Selatan khususnya di Kota Makassar. Sawati Daud merupakan seorang tokoh perempuan yang mendapat tempat pada masa itu.

Salawati Daud lahir tahun 1909 di Sangir Talaud. Ia tumbuh dewasa dalam suasana baru politik etis dan perang penaklukan di sekitarnya. Ia kemudian tumbuh dengan menaruh perhatian serius pada arah pergerakan saat itu, sehingga pada 2 April 1931, ia menulis,

“Soenggoehpoen saja seorang perempuan sahaja akan tetapi hatikoe penoeh dengan kasih dan tjinta bekerdja oentoek bangsa dan tanah air, apakah goenanja kekajaan kelimpaan djikalau rakjat berkeloeh kesah. Saja merasa bahwa kewadajiban kita kaoem perempuan membantoe pekerdjaan lelaki baik dalam hidoep hari-hari maopoen didalam perdjungan pergerakan karena bangsa dan tanah toempah darah”.⁶

Kesadaran politiknya membuat Salawati Daud pindah ke Makassar dan bergabung dengan Perserikatan Selebes.⁷ Saat itu Makassar berkembang menjadi sebuah kota kosmopolitan yang sebagian penduduk melakukan migrasi maupun masyarakat yang melakukan urbanisasi.⁸ Kota ini secara perlahan juga menjadi pusat pergerakan politik di Sulawesi Selatan pada abad 20. Ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan Salawati Daud memilih Perserikatan Selebes di Makassar. Pertama, adanya persamaan platform politik, yaitu suatu organisasi yang berasaskan kebangsaan menuju bangsa Indonesia yang merdeka dan bersatu. Kedua, pertimbangannya untuk bergabung dengan anggota-anggota yang Perserikatan Selebes yang dapat dikategorikan sebagai kaum intelektual yang berasal dari berbagai daerah. Pertimbangan ketiga, adalah kemungkinan karena adanya jalinan pertemanan antara Salawati Daud dan beberapa anggota lainnya di Perserikatan Selebes yang sebagian besar berasal dari Manado.⁹

Salawati Daud juga kemudian mendirikan surat kabar. Tindakan itu diambil berhubung belum tersedianya surat kabar yang ditujukan kepada para pembaca perempuan di wilayah

⁶ *Barisan Kita*, 2, April 1931, (Ideologi Salawati Daud), hlm. 4.

⁷ *Berita Indonesia*, 2 Juli 1954, (Hijrahnya Salawati Daud Ke Makassar), hlm.7.

⁸ Dias Pradadimara, “Dari Makassar ke Makassar. proses “Etnisasi” Sebuah Kota”, dalam Dias Pradadimara dan Muslimin A.R. Effendy (Ed.), *Kontinuitas dan Perubahan dalam Sejarah Sulawesi Selatan* (Yogyakarta: Ombak, 2004), hlm. 184-189.

⁹ *Barisan Kita*, Tahun I no. 1 Maret 1931, hlm. 2-3. Soeara Perdamaian. No. 4. (Jakarta, Perpustakaan Nasional, 30 September 1930). Hlm. 2

Makassar. Surat kabar yang diterbitkan Salawati Daud yakni surat kabar Wanita.¹⁰ Salawati Daud merupakan pemimpin redaksi sekaligus sebagai pengelola surat kabar. Surat Kabar Wanita yang diperuntukkan bagi perempuan, dalam pemberitaannya mengangkat topik-topik yang berkaitan dengan persoalan perempuan. Meskipun demikian, topik-topik yang berkaitan dengan kondisi politik, dan sosial yang sedang berkembang di Makassar pada masa tersebut, dibahas pula dalam surat kabar Wanita.¹¹ Namun setelah tiga tahun surat kabar Wanita berhenti terbit.

Pasca pengakuan kedaulatan, Salawati Daud kemudian menerbitkan lagi surat kabar bernama surat kabar Bersatu pada tahun 1953. Ia kembali menerbitkan surat kabar lagi, berkaitan dengan terhentinya aktivitas ia sebagai anggota DPD KBM (Dewan Pemerintahan Daerah Kota Besar Makassar) pada Agustus 1953, Ia mengisi waktu luangnya dengan meneruskan aktivitasnya di lapangan sosial persuratkabaran.¹² Di bidang sosial, ia juga kemudian kembali aktif dalam mengelola yayasan pendidikan bagi anak yatim para korban 40.000 jiwa.

Tahun 1950-an dapat dikatakan NIT telah dibubarkan dan Sulawesi Selatan kembali dalam pengakuan Negara Kesatuan Republik Indonesia, namun kondisi wilayah masih tetap bergolak dan masyarakatnya masih dalam keadaan belum aman dan tertib.¹³ Gerakan Kahar Muzakkar yang mulai berjalan pada akhir tahun 1950, merupakan salah satu faktor yang memberi pengaruh terhadap kondisi sosial dan politik di Sulawesi Selatan dan di Kota Makassar. Gerakan Kahar Muzakkar yang mulanya dilatarbelakangi oleh ketidakpuasan kebijakan militer RI, memuncak pada pilihannya untuk keluar dari Republik dan bergabung dengan Darul Islam di Jawa Barat. Gejolak selama pemberontakan Kahar Muzakkar itu membawa penderitaan bagi masyarakat. Aktivitas Kahar juga dipandang oleh Salawati Daud sebagai salah satu potensi yang dapat

¹⁰ Berita Indonesia, 1954. hlm. 2

¹¹ Kementerian Penerangan, 1953, hlm. 541.

¹² *Marhaen*, 25 Agustus 1953, (Aktivitas Salawati Daud di lapangan sosial), hlm. 1.

¹³ Laporan Politik Tahun 1951-1953, Arsip Propinsi Sulawesi 1946-1960 (Rahasia), No. Reg. 232, 234, dan 703 (Koleksi Kantor Arsip Propinsi Sulawesi Selatan).

memecah belah persatuan bangsa Indonesia. Keikutsertaan Salawati Daud sebagai mediator antara pemerintah dengan Kahar Muzakkar.

Salawati Daud pun dipilih sebagai ketua dalam “Komite Djasa” -komite untuk membahas dan mendiskusikan masalah penyelesaian gerilya di Sulawesi Selatan.¹⁴ Keberhasilan Komite Djasa membawa persoalan masalah gerilya di Sulawesi Selatan sampai ke tingkat pusat sehingga menjadi salah satu perhatian utama pemerintah untuk diselesaikan, memberi pengaruh yang cukup positif terhadap keberadaan komite itu dalam penyelesaian masalah gerilya. Meskipun pernah ditawan oleh Kahar Muzakkar, namun Salawati Daud selalu mengedepankan diplomasi untuk mendekati kelompok Kahar. Pergerakan Salawati Daud tidak hanya berfokus untuk menyelesaikan masalah Gerilya di Sulawesi Selatan melainkan juga turut serta dalam memperhatikan kehidupan sosial kaum perempuan, dengan cara memberikan pendidikan untuk ibu-ibu rumah tangga, membuka lapangan pekerjaan seperti: Kooperasi dan melatih ibu-ibu rumah tangga untuk membuat kerajinan.

4. Salawati Daud di Dewan Perwakilan Rakyat Sulawesi Selatan

Pada sidang pertama di Sulawesi Selatan yang membicarakan cara pemilihan anggota-anggota Dewan Pemerintah, timbul perdebatan dan suasana yang menegangkan karena banyaknya muncul mosi tidak percaya kepada Salawati Daud yang dilontarkan peserta sidang dan disebabkan oleh perlombaan untuk memperoleh sebanyak-banyaknya kursi maka mau tidak mau banyak peserta sidang menggabungkan diri dalam Fraksi Republikan, yang pada waktu itu dibentuk dan dipimpin oleh saudara J. Baudi.¹⁵ Salah satu mosi tidak percaya yang dilontarkan terhadap Salawati Daud berasal dari Mr. Tjia Kok Tjiang menyoal nama untuk fraksi bukanlah suatu pretensi, di luar dari pikiran yang kurang sehat maka prinsip yang dianut dan selanjutnya diperjuangkan menjadi pegangan bagi Fraksi *Republikein*. Persoalan saling menghargai, peserta sidang tetap menghargai Ny. Salawati Daud sebagai seorang *Republikein* karena melihat perjuangannya semenjak proklamasi 17 Agustus 1945 tetapi dengan sikap Ny. Salawati Daud yang menganggap peserta

¹⁴ Komite Djasa merupakan suatu komite yang dibentuk oleh sekelompok partai dan organisasi politik di Makassar pada tanggal 18 Agustus 1950. Kementerian Penerangan, 1953, hlm. 339.

¹⁵ *Nusantara*, Senin 4 September 1950 (Mosi tidak percaya terhadap Salawati Daud), hlm. 3.

sidang sebagai penentang politiknya, maka dari itu menimbulkan pertanyaan apakah peserta sidang yang hadir dapat dipilih untuk menjadi Wakil Ketua Panitia Tahanan Politik.

Kondisi dan kekacauan yang ditimbulkan pada sidang pertama 24 Juli 1950 sehingga tidak tercapainya kesepakatan mengenai cara pemilihan anggota-anggota Dewan Pemerintah, membuat Mr. Tjia Kok Tjiang mengajukan usulan rancangan tentang pencalonan Kepala Daerah dan pemilihan Ketua dan Wakil Ketua DPR beserta anggota-anggota Dewan Pemerintah yakni pembagian kursi atas dasar perwakilan. Pilihan ini dianggap dapat mengakomodasi keinginan oleh fraksi-fraksi, golongan, maupun yang tidak memiliki fraksi untuk mengambil bagian dalam pemerintahan, dengan tidak melepaskan syarat-syarat kecakapan dan kesanggupan. Harapan peserta sidang terhadap Ny. Salawati Daud yang saat itu menjadi ketua dewan untuk menghargai bantuan peserta sidang dalam mengatasi ketegangan ternyata sia-sia karena Salawati Daud punya pandangan tersendiri dalam menyelesaikan permasalahan mosi tidak percaya yang dilontarkan terhadap dirinya.

Salawati Daud sempat melakukan pembelaan terhadap mosi yang dilontarkan terhadap dirinya dengan mengatakan bahwa DPR tidak berhak dan tidak bisa ikut campur tangan, karena permasalahan ini adalah semata-mata suatu perkara antara dirinya dan Biro P.P.R.I.¹⁶ Namun Salawati Daud memilih meletakkan jabatannya sebagai anggota dan Ketua Dewan Sulawesi Selatan. Menghadapi dan menanggapi berbagai permasalahan yang muncul sebagai upaya untuk mengurangi perpecahan yang mulai muncul baik dalam Dewan Perwakilan Daerah Sulawesi Selatan maupun permasalahan di berbagai wilayah akibat dari gerakan-gerakan separatis (memisahkan diri) di beberapa wilayah Indonesia seperti: Gerakan Kahar Muzakkar (Sulawesi Selatan, Gerakan Permesta (Sulawesi Utara), Gerakan Kartosuwiryo (Jawa Barat), Gerakan RMS (Maluku) dan lain sebagainya, yang telah menandakan bahwa rasa persatuan dalam diri sebagian masyarakat Indonesia mulai pudar dan melemah.

Gerakan Salawati Daud tidak hanya berfokus bagi masyarakat Sulawesi Selatan saja, akan tetapi gerakkannya ke arah yang lebih meluas dan menyeluruh bagi masyarakat Indonesia. Diawali dengan terpilihnya sebagai Ketua Komite Perdamaian cabang Makassar pada tahun 1953, maka ia

¹⁶ *Nusantara*, (1950).

mulai bergabung dalam organisasi-organisasi sosial yang bersifat nasional gerakannya, seperti dalam Gerwani (Gerakan Wanita Indonesia) dan SBWI (Serikat Buruh Wanita Indonesia) cabang Makassar. Salawati Daud mulai bergabung ke dalam organisasi tersebut sekitar tahun 1954, dan kemudian pada tahun yang sama Salawati Daud secara berturut-turut diangkat sebagai ketua dalam kedua organisasi tersebut.¹⁷

Terjunnya Salawati Daud dalam organisasi tersebut, telah berdampak terhadap perubahan arah gerakan politiknya dari tingkat lokal ke tingkat nasional dan tentunya telah berpengaruh dalam perkembangan pribadi Salawati Daud dan perkembangan dalam berpikir dan mengubah arah gerakan politik Salawati Daud dari tingkat lokal ke tingkat nasional.¹⁸ Sehingga pada pemilihan umum untuk pertama kalinya dilaksanakan pada tahun 1955, Salawati Daud ikut berpartisipasi sebagai salah satu aktivis perempuan di Sulawesi Selatan. Salawati Daud berpandangan bahwa pemilu merupakan kesempatan yang baik untuk kaum perempuan untuk ikut serta dalam pesta demokrasi karena adanya persamaan hak memilih dan dipilih. Dengan demikian dapat mendapatkan pemikiran dari perempuan dan laki-laki untuk menciptakan suatu peraturan masyarakat yang adil dan makmur, menciptakan dunia yang damai. Di mana tidak ada lagi pemerasan antara laki-laki dan perempuan dan tidak ada lagi penindasan antara satu golongan terhadap golongan yang lain.¹⁹

Salawati Daud kemudian bersedia dicalonkan sebagai anggota parlemen tingkat pusat (DPR RI) oleh PKI (Partai Komunis Indonesia) sebagai anggota yang tidak memiliki partai. Namun keputusan yang diambil Salawati Daud menimbulkan kontroversi dan kecurigaan terutama rekan-rekannya yang pernah satu organisasi dengannya, karena selama bersama di organisasi politik tidak pernah ada organisasi yang beraliran komunis. Akibat dari lontaran-lontaran isu dan sindiran yang ditujukan kepada Salawati Daud maka kemudian memberikan pernyataan dan

¹⁷ *Pedoman Rakjat*, 28 September 1955, hlm. 1. Marhaen, 30 Maret 1954, hlm. 2. *Pedoman Rakjat*, 26 April 1954, (Salawati Daud diangkat menjadi ketua Komisi Perdamaian pada April 1953). hlm. 2. Lihat juga Siti Maryam, *op.cit.*, hlm 176-177.

¹⁸ Siti Maryam, 2009. hlm. 177.

¹⁹ *Pedoman Rakjat*. 28 April 1954 (Pandangan Salawati Daud terhadap kesempatan dalam Pemilu), hlm. 2. Lihat juga Siti Maryam, 2009. hlm. 178-180.

penjelasan dalam salah satu surat kabar yang ada di Sulawesi Selatan, ia menjelaskan berbagai hal kenapa ia bersedia dicalonkan oleh partai yang berlambang palu arit itu.²⁰

Adanya beberapa perubahan strategi yang dilakukan oleh PKI, maka pada Pemilu 1955 selesai dilaksanakan membuat partai itu berhasil masuk sebagai empat partai besar dalam perolehan suara terbanyak. Setelah Pemilu pertama dilaksanakan pada bulan September dan Desember 1955, maka pada tanggal 1 Maret 1956 tersusunlah anggota-anggota DPR dan Konstituante yang baru. Berdasarkan hasil pemilu itu, terpilih sejumlah anggota DPR yang terdiri dari 272 orang dan 542 orang anggota Konstituante. Salawati Daud terpilih pada pemilu 1955, merupakan salah satu anggota yang dicalonkan oleh Partai PKI. Atas keberhasilan dan pengalaman dalam proses penyelesaian masalah gerilya dan gerakan Kahar Muzakkar di Sulawesi Selatan menempatkan Salawati Daud dalam Komisi Pertahanan dan Keamanan dan merupakan salah satu keinginannya untuk duduk dalam komisi tersebut.²¹

Salawati Daud merupakan penggagas persatuan yang penting khususnya di Sulawesi Selatan dan di Makassar, sejak masa pemerintahan Belanda hingga dalam masa mempertahankan kemerdekaan telah melakukan banyak sejumlah pergerakan dan usaha-usaha dalam membangun persatuan dan kesatuan yang ada di Sulawesi Selatan dan di Indonesia. Dengan keterlibatannya dalam gerakan politik, pendidikan perempuan, pers, kesehatan, dan gerakan sosial yang dilakukannya di Sulawesi Selatan dan di Makassar telah memberikan sumbangsih tenaga dan pikiran demi terciptanya suatu persatuan dan kesatuan dalam berbangsa dan bernegara. Sehingga dalam perkembangan gagasan pemikiran tentang persatuan dan gerakan perjuangannya

²⁰ “Dikemukakan oleh Salawati Daud bahwa tawaran-tawaran yang serupa telah banyak diterimanya dari partai-partai lain, tetapi semua ditolaknya karena didalam penawarannya tidak disertakan dengan program perjuangan yang menjadi garis-garisnya untuk menjadi pegangan. Akan tetapi setelah membaca manifest yang ditawarkan oleh PKI terkait untuk mengadakan penggabungan sisa suara dari partai-partai yang belum mencukupi untuk memperoleh kursi di parlemen, nama-nama dari daftar PKI merupakan orang-orang tidak memiliki partai adalah demokratis dan menurut undang-undang pengajuan, maka saya bersedia dicalonkan sebagai orang yang tidak memiliki partai dengan tanda palu arit.” *Pedoman Rakjat*, 11 Agustus 1954, hlm. 1. Lihat Juga Siti Maryam, 2009, hlm. 180.

²¹ Siti Maryam, 2009. hlm. 186-187.

mengalami perubahan arah dalam gerakannya, yaitu dari gerakan politik yang bersifat lokal berubah kearah nasional.

5. Milda Mahtilda Towoliu: Sebagai Pelopor Pemersatu Gerakan Perempuan

Milda Mathilda Towoliu merupakan kelahiran Ulu-Siau-Sangir Talaud tanggal, 7 Februari 1913. Dalam perjalanan kariernya sebagai tokoh perempuan yang turut serta memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan, Ny. Towoliu juga dikenal sebagai tokoh yang penting dalam mendukung pemberian otonomi bagi Provinsi Sulawesi Utara. Tetapi ketika Makassar dijadikan sebagai ibukota NIT, pergerakan Ny. Towoliu diarahkan ke pergerakan yang lebih luas. Bersama para pemimpin sipil di Makassar seperti Gubernur Andi Pangeran Pettarani, Residen Andi Burhanuddin, Henk Rondonuwu (Pemimpin SK Pedoman Rakyat), dan Saleh Lahade, ia aktif mengadakan perundingan-perundingan untuk menyelesaikan masalah otonomi tersebut.²²

Keterlibatan perempuan dalam pergerakan memperjuangkan hak-hak perempuan, mempertahankan kemerdekaan dalam hal ini berkaitan dengan diplomasi, politik, dan pencarian identitas bangsa, maka dari itu tidak dapat dipisahkan dari keterwakilan kaum perempuan dalam menanggapi masalah nasional maupun tingkat lokal. Milda Towoliu atau lebih familier adalah Ny. Towoliu bersama-sama dengan Salawati Daud aktif dalam menggerakkan massa untuk menentang kembali masuknya Pemerintahan Belanda di Sulawesi. Sekitar tahun 1948-1949, Ny. Towoliu bersama-sama dengan rekannya yang sebagian berasal dari anggota Partai Kedaulatan Rakyat seperti ibu Salawati, Henk Rondonuwu membentuk suatu tim penerangan. Tim ini bertujuan untuk memberikan penerangan kepada masyarakat luas agar tentara Belanda tidak kembali ke Indonesia dan menguasai wilayah Sulawesi Selatan termasuk Makassar. Keterlibatan Ny. Towoliu dan rekan-rekannya dapat dikatakan sangat berpengaruh terhadap kemajuan perkumpulan-perkumpulan organisasi perempuan. Atas anjuran Perkumpulan Wanita Penolong Sosial (P.W.P.S) maka dapat dikumpulkan beberapa perkumpulan perempuan, yaitu Aisyiah, Pikat atau Percintaan Ibu Kepada Anak Turun Temurun, Perkumpulan Wanita Katholik Indonesia, Perkumpulan Kematian Kaum Ibu Minahasa, Partai Kedaulatan Rakyat (PKR) bagian Perempuan, Partai Serikat Islam Indonesia (PSII) bagian perempuan, Perkumpulan Wanita Maluku, Perkumpulan Wanita Suku Toraja,

²² S.J Budi Susanto, 2003, hlm. 188-189.

Perkumpulan Wanita Suku Buton, Serikat Buruh Wanita dan Perkumpulan Pemuda Indonesia.²³ Perkumpulan perempuan ini juga mendirikan Serikat Perkumpulan Wanita (S.P.W) bersama-sama dengan Chung Hwa Fu Nu Hui, perkumpulan perempuan Tionghoa dan *Vrouwenkring van Makassar*. Perkumpulan wanita segala bangsa yang tergabung dalam S.P.W ini mempunyai struktur dalam membantu menanggapi masalah-masalah yang dihadapi oleh kaum perempuan :

P.W.P.S., merupakan perkumpulan perempuan Indonesia di Makassar yang didirikan oleh Ny. Ratulangi pada tahun 1946, namun ketika Ny. Ratulangi terpaksa ikut dengan suaminya Dr. Ratulangi ke tempat pembuangannya di Serui (Nieuw Guinea) maka pimpinan diserahkan kepada Ny. Tadjudin Noor untuk sementara waktu. Setelah Ny. Tadjudin Noor menarik diri maka Ny. Maladjong dipilih menjadi ketua P.W.P.S. karena banyaknya permasalahan perempuan yang dihadapi di Makassar, salah satunya persoalan buta huruf. Ny. Maladjong pun mengarahkan P.W.P.S untuk mendirikan suatu Sekolah Kepandaian Puteri (S.K.P) yang pernah menjadi dimimpikan Ny. Dr. Ratulangi. Meskipun banyak rintangan secara finansial dan kekurangan guru Ny. Towoliu mengorbankan tenaga dan jiwanya, sampai S.K.P berkembang di Makassar dan sampai di pedalaman Sulawesi Selatan demi pembebasan buta huruf.²⁴

Perkembangan S.K.P di Makassar dapat dilihat dari murid-muridnya yang terdiri dari anak-anak kaum nasionalis, sehingga pendidikan di S.K.P. dapat diselenggarakan menurut pendidikan nasional, pendidikan percaya pada diri sendiri dan pendidikan kolonial dijauhkan. Selain organisasi S.K.P juga didirikan sebuah Rumah Yatim “Murni” di mana dalam rumah yatim ini dapat dipelihara semua anak-anak yatim dan miskin dengan tidak melihat agama dan bangsa. Akan tetapi walaupun telah diusahakan beberapa macam usaha untuk anak-anak yang tinggal di rumah yatim, namun tidak memberikan kepuasan untuk penduduk pada umumnya yang menjadi tanggung jawab mereka, karena mereka berpandangan bahwa masuk dalam rumah Yatim berarti

²³ *Madjalah Karya* : Menuju Kemerdekaan dan Kemajuan Wanita Th. 1 no.2 (1947. T.h. 5 no.7 (1951) . Jakarta: Badan Penerbit Karya Martacoa 1947-1951), no. Reg, B. 3520. (Jakarta, Perpustakaan Nasional), hlm. 24.

²⁴ *Madjalah Karya*, 1951.

masuk dalam dunia lain. Itu disebabkan karena penghidupannya teratur maka mereka merasa kehilangan kemerdekaannya dan tidak dapat berbuat banyak sesuai dengan kemauannya.²⁵

Dalam bidang politik, Ny. Towoliu turut andil dalam pengambilan keputusan demi terciptanya kesejahteraan masyarakat. Pada sidang DPR Daerah Sulawesi Selatan ke III pada tanggal 4 bulan September 1950 melangsungkan rapat umum yang dimana dihadiri oleh pembesar-pembesar di antaranya Acting Gubernur Lapien, Wakil Walikota Qaimuddin, Kepala Pemerintah Daerah D.S.S dan anggota-anggota Pemerintah D.S.S dan dihadiri oleh 42 Anggota Dewan. Nuruddin Sjahadat Ketua Dewan mengatakan dalam pidato pembukanya, bahwa rapat dewan hari ini adalah lanjutan sidang-sidang yang lalu sehingga diharapkannya kepada sesama anggota dewan agar kepentingan rakyat lebih diutamakan dari pada kepentingan partai atau diri sendiri dan diharapkan pula di dalam menghadap perubahan ketatanegaraan sedapat mungkin tidak akan ada pegawai yang dikeluarkan atau di *screening*.

Kepala Daerah S.S Saudara I. A. Saleh Daeng Tompo mengharapkan hendaknya sidang ketiga kalinya dari DPR DSS diliputi suasana yang baik dan terdapatlah kerja sama yang erat antara sama-sama anggota dan anggota Dewan dan Pemerintah Daerah. Pengesahan hasil rapat oleh notulen tanggal 28 Juli sampai 1 Juli 1950, maka anggota Nyonya Towoliu mengajukan pertanyaan, apakah hasil rapat yang lain yang tidak dihadirinya itu sah atau tidak, karena menurut surat kabar dalam pemberitaannya rapat pada waktu itu pada saat dilaksanakan sampai selesai tidak mencukupi forum sehingga dianggap tidak sesuai aturan rapat. Akan tetapi pertanyaan itu mendapatkan sambutan dari beberapa anggota-anggota yang kesimpulannya bahwa rapat yang lalu dalam pembahasan pengangkatan Ketua Dewan berlaku dan sah, akan tetapi meski pertanyaan demikian Ketua Dewan saudara Nuruddin Sjahadat tidak urung memajukan pertanyaan pada saat rapat apakah kedudukannya sebagai Ketua sah atau tidak.

Suasana rapat semakin menegangkan karena mendapatkan protes yang diajukan oleh Ny. Towoliu dan pada saat kondisi kritis anggota Abdul Waris segera tampil dengan pernyataannya bahwa pada saat diadakan rapat pemilihan ketua di bawah pimpinannya maka dirinya yang akan bertanggung jawab dan rapat pada saat itu sah adanya. Maksud dari itu Ny. Towoliu menyatakan

²⁵ *Madjalah Karya*, 1951.

sebabnya dan bertanya karena ia khawatir dan memikirkan nama baik dan derajatnya anggota dewan karena hal itu digembor-gemborkan oleh surat kabar.²⁶

Dari sisi lain keterlibatan Ny. Towoliu dalam organisasi perempuan juga memberikan pengaruh yang cukup. Pada tahun 1951 GOWANI mengeluarkan mosi menyetujui aksi BPB dalam hal ini GOWANI berada di belakang BPB (Badan Perjuangan Buruh) yang melakukan protes Badan Perjuangan Buruh Makassar, sebagai Ketua GOWANI maka Ny. Towoliu menyetujui apa yang di perjuangkan oleh Badan Perjuangan Buruh di Makassar.²⁷ Tujuan utama dari organisasi GOWANI adalah merekatkan persatuan perempuan Indonesia, memajukan pengetahuan dan pendidikan perempuan serta mempertinggi perkembangan lahir dan batin dari kaum perempuan dan melaksanakan program pemberdayaan terhadap perempuan dalam mempertahankan posisi sosialnya.²⁸

Gambaran tersebut memperlihatkan bahwa Ny. Towoliu tidak hanya berfokus memperjuangkan hak-hak perempuan, tetapi juga dalam hal kehidupan sosial dan ekonomi dalam kehidupan masyarakat. Selain itu Ny. Towoliu juga mengkritisi sikap orang-orang yang memaknai dirinya sebagai pejuang, dalam surat kabar Nusantra (Dapur Marhaen) dijelaskan bahwa Ny. Towoliu menyatakan mengenai bahayanya nafsu kebendaan (keserakahan) dalam masyarakat kita. Filosofi perempuan memang biasanya tepat, hanya saja banyak yang dialami dalam kehidupan sehari-hari, ialah orang-orang yang memaknai dirinya sebagai pejuang menjadi gila terhadap benda-benda, barang-barang yang bagus, mobil, rumah. Katanya berjuang untuk rakyat tapi yang dicari ialah pangkat, kedudukan dan dalam zaman perebutan, kalau bisa jadi Gubernur.²⁹

Ia kemudian dikenal sebagai pelopor pemersatu gerakan perempuan di Sulawesi Selatan karena telah berhasil mendirikan Gabungan Organisasi Wanita Indonesia (GOWANI) di Makassar

²⁶ *Nusantra*, 3 September 1950 (Protes Ny. Towoliu terhadap anggota Abdul Waris, pada pemilihan ketua), hlm. 3.

²⁷ *Nusantra*, 1951. (Ny. Towoliu menyetujui apa yang diperjuangkan oleh Badan Perjuangan Buruh di Makassar), hlm. 4. Kolom: 2-3.

²⁸ Arsip Provinsi Sulawesi, 1974. hlm. 4.

²⁹ Arsip Provinsi Sulawesi, 1974. hlm. 3.

dan menjabat sebagai ketua sampai tahun 1952. Atas keterlibatan dan sumbangsuhnya dalam memperjuangkan hak-hak perempuan maka telah menghimpun beberapa organisasi perempuan yang ikut bergabung dalam GOWANI di antaranya adalah Perkumpulan Wanita Penolong Sosial, Persatuan Wanita Indonesia Toraja, Wanita Katolik, dan Persatuan Wanita Maluku. Hingga pada masa Orde Baru, kegiatannya dihabiskan dalam dunia pendidikan ditandai dengan mendirikan Universitas Kristen Paulus (UKIP) Ujung Pandang, ia menjabat sebagai Rektor atau pemimpin di Universitas tersebut. Hal itu dilakukan untuk mengenang kembali semasa menjadi pengajar di *Openbare Schakeschool Buitenzorg* (1936), kemudian Ny. Towoliu mengabdikan dan menjadi pengajar di universitas tersebut.³⁰

Dampak Pergerakan Wanita terhadap Perlakuan Wanita di Kota Makassar

Pergerakan perempuan di Kota Makassar pasca kemerdekaan 1945-1965 telah memberikan gambaran bahwa perlawanan atau pergerakan yang mereka lakukan bukan semata-mata untuk keperluan pribadi melainkan memperjuangkan kepentingan umum dan hak-hak perempuan dalam bermasyarakat baik dalam bidang sosial, ekonomi, pendidikan, politik maupun kebudayaan. Dari pembahasan ini memberikan gambaran bagaimana peran Salawati Daud dan Ny. Towoliu dalam memperjuangkan hak-hak perempuan di Makassar, seperti juga yang dijelaskan dalam surat kabar *Antara* terbitan Makassar menjelaskan bahwa dalam memperingati 25 tahun Gerakan Wanita Indonesia Ny. Towoliu dan Salawati Daud dalam pembicaraan mereka di Balai Pertemuan Masyarakat mengenai organisasi Aisjiah merupakan organisasi perempuan yang pertama yang membuka kesempatan kepada kaum perempuan untuk turut andil dalam memperjuangkan hak-hak perempuan. Kaum perempuan yang dahulunya hanya terbatas dalam rumah, sedikit demi sedikit tampak ditengah-tengah masyarakat sebagai orang-orang penggerak dan menjadi pemimpin baik dalam organisasi maupun terlibat sebagai wakil rakyat dalam partai politik.³¹

Perkembangan Gerwani di Sulawesi Selatan tampak pada tantangan dalam menjawab isu atau permasalahan kaum perempuan di Indonesia pada umumnya dan di Sulawesi Selatan pada

³⁰ *Pedoman Rakyat*, 28 Agustus 2001 (Aktivitas Ny. Towoliu dalam dunia pendidikan dengan mendirikan Universitas Kristen Paulus UKIP), hlm.12.

³¹ *Antara*, 1953 (peringatan 25 tahun Gerakan Wanita Indonesia), hlm. 3.

khususnya, di antaranya adalah: a. hak-hak perempuan; adanya Undang-undang perkawinan, persamaan upah lelaki dalam waktu yang sama, persamaan hak dalam menuntut ilmu, dan permasalahan hak dipilih dan memilih. b. memperjuangkan kebahagiaan anak; salah satunya adalah memperjuangkan agar pemerintah memperbanyak rumah-rumah yatim piatu, rumah-rumah penitipan anak-anak dari buruh perempuan dan mencegah adanya peperangan. c. Penghapusan sisa-sisa feodalisme dan penghapusan *polorogo*, kawin paksa, kerja paksa, dan perampasan hak-hak asasi rakyat. d. menyempurnakan kemerdekaan yang sejati, menghapuskan modal asing dan membantu perusahaan nasional dalam memberikan kredit yang cukup kepada pengusaha-pengusaha kecil dalam upaya pemberdayaan masyarakat khususnya ibu rumah tangga dan memperbanyak industri.³² Terbentuknya organisasi perempuan di Sulawesi Selatan dan di Kota Makassar telah memberikan pengaruh terhadap pola pikir perempuan, kaum perempuan sudah berani untuk mengatur karena antara perempuan dan laki-laki mempunyai persamaan hak yang sama dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat.³³

KESIMPULAN

Pergerakan perempuan merupakan suatu bentuk perjuangan yang dilakukan oleh perempuan dengan rasa kesadaran dan cinta tanah air. Pergerakan itu tidak hanya mewujud dalam pilihan untuk berjuang di garis depan pertempuran. Lebih dari itu, organisasi yang didirikan tokoh-tokoh perempuan ini menjadi alat pergerakan perempuan dalam memperjuangkan, mempertahankan, dan mengisi kemerdekaan. Pergerakan perempuan di Kota Makassar telah memberikan nuansa tersendiri terhadap sejarah Indonesia sepanjang periode 1945-1960. Tokoh perempuan bergerak dan ikut terlibat dalam mempertahankan kemerdekaan baik dalam pergerakan fisik maupun keterlibatan dalam parlemen dan politik di Sulawesi Selatan.

Hasil penelitian ini memperlihatkan para pejuang perempuan bergerak bukan karena kepentingan pribadi melainkan adanya kesadaran diri (senasib) dan sepejuangan dalam membangun bangsa dan negara. Terwujudnya masyarakat adil dan makmur, materiil dan spiritual di dalamnya terdapat kesempatan yang sama untuk berpolitik dan kesempatan untuk terlibat dalam

³² Inventaris Arsip Tana Toraja 1951-1959, hlm. 3-4.

³³ *Indonesia Timur*. 1949 (kaum perempuan sudah berani untuk mengatur), hlm. 4.

usaha perbaikan perekonomian negara. Dinamika pergerakan perempuan sesuai dengan zaman yang mereka alami, pergerakan tokoh perempuan seperti Emmy Saelan, Siti Mulyati Hasyim, Salawati Daud, Milda Mathilda Towoliu sebagai tokoh pergerakan perempuan di Makassar pasca kemerdekaan, tidak dapat dipisahkan dari kondisi tempat, lingkungan sosial-politik dan zaman yang melatarbelakangi perjalanan kehidupan mereka dalam kiprah perjuangan dan pergerakan. Dinamika pergerakan perempuan pada tahun 1945-1949 lebih banyak terlibat dalam pergerakan fisik dan berada di garis depan bersama dengan kaum laki-laki sedangkan pada tahun 1950-1960 pergerakan perempuan di Makassar lebih di fokuskan kepada masalah kaum perempuan dalam menanggapi masalah sosial, ekonomi dan ikut serta dalam politik.

Pergerakan yang dilakukan oleh Emmy Saelan dan Siti Mulyati Hasyim dalam pergerakan fisik, termasuk kegiatan dalam memberikan bantuan-bantuan pengobatan, bertindak sebagai perawat dan mengangkat senjata di garis depan hingga keterlibatan dalam memberikan informasi-informasi (intel), telah mengubah arah pergerakan perempuan ke arah yang lebih luas demi perbaikan nasib perempuan dalam masyarakat hingga perubahan dalam sistem kehidupan masyarakat dalam berbagai aspek salah satunya perbaikan posisi perempuan dalam politik. Pergerakan kaum perempuan di Makassar 1945-1965 membangkitkan semangat kaum perempuan untuk turut terlibat dalam pergerakan yang ditandai dengan munculnya organisasi-organisasi perempuan baik yang bersifat politik maupun non politik. Dengan keterlibatan kaum perempuan dalam organisasi seperti: GOWANI, GERWANI, PERSIT, PWPS, K.W.L, PERWARI, telah mengubah tatanan kehidupan perempuan dalam berbagai aspek kehidupan seperti: perbaikan pendidikan, perjuangan upah dan perbaikan nasib buruh di Makassar, masalah perkawinan, hingga perjuangan dalam politik dalam membangun bangsa dan negara. Keterwakilan perempuan dalam parlemen mulai tampak dan sangat penting dalam membangun dan memberikan sumbangsih pikiran demi kemajuan masyarakat dan khususnya kaum perempuan di Kota Makassar.

REFERENSI

Anderson, Benedict R. O’G dan Ruth T. Mc.Vey., 2001. “Kudeta 1 Oktober 1965: Sebuah Analisis Awal”. Yogyakarta: LKPSM-Syarikat.

- ANRI. Kementerian Penerangan. (Indonesia Berjuang) No. Reg. 113 (Koleksi ANRI, Jakarta).
- ANRI. Kementerian Penerangan. (Kaum Buruh dan Perjuangan) No. Reg.118 (Koleksi ANRI, Jakarta).
- ANRI. Kementerian Penerangan. (Konperensi Wanita Indonesia 1946) No. Reg. 162 (Koleksi ANRI, Jakarta).
- ANRI. Kementerian Penerangan. (Merdeka) No. Reg. 119 (Koleksi ANRI, Jakarta).
- ANRI. Kementerian Penerangan. (Wanita dan Akibat Peperangan) No. Reg. 250 (Koleksi ANRI, Jakarta).
- ANRI. Kementerian Pertahanan RI. (Badan Kongres Wanita Indonesia). No. Reg. 724. (Koleksi ANRI, Jakarta).
- ANRI. Kepolisian Negara (Rapat Umum Hari Wanita Internasional) No. 608. (Koleksi ANRI, Jakarta).
- Arsip Prov. Sulawesi Selatan 1946-1960. No. Reg. 375.
- Arsip Saksi Sejarah Kodam XIV/Hasanuddin, Perjuangan Rakyat Sulawesi Selatan Dalam Perang Kemerdekaan 1945-1950. 1982
- Arsip Tana Toraja 1961-1969, No. Reg. 640. (Koleksi Arsip Provinsi Sulawesi Selatan)
- Arsip. Kementerian Penerangan Republik Indonesia, Provinsi Sulawesi, Makassar, 1953.
- Berita Indonesia: 2 Juli 1954. (Koleksi Perpustakaan Nasional Salemba, Jakarta).
- Catatan Kaki- Edisi januari 2018, (Salawati Daud, Tokoh Perempuan Revolusioner Sulawesi Selatan, Sejarah Tak Mencatat itu).
- Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Propinsi Sulawesi Selatan. Sejarah Perjuangan Emmy Saellan dalam Menentang Tentara Belanda di Sulawesi Selatan. JARAH DAM XIV/HN, Agustus, 1974).
- Djakarta: (Durev). Nopember 1965 (Koleksi Perpustakaan Nasional Salemba, Jakarta).

- Fakih, Mansour., 1996. "Masyarakat Sipil Untuk Transformasi Sosial". (Yogyakarta: Pustaka Pelajar).
- Fakih, Mansour., 2016. "Analisis Gender dan Tranformasi Sosial" (Yogyakarta: Insist Press).
- Gonggong, Anhar., 1982. "Perlawanan : Sebuah Perenungan dari Pengkajian Sejarah, Makalah Dalam Seminar Sejarah Perjuangan Rakyat Sulawesi Selatan Menentang Penjajahan Asing. (Proyek IDSN, Jakarta).
- Harian Nusantra, Jum'at, 23 Februari 1951 (Koleksi Perpustakaan Nasional Salemba, Jakarta).
- Hidayat Djoeffan, Sri., 2001. "Gerakan Feminisme Indonesia Tantangan Dan Strategi Mendatang" (Mimbar NO. 3 Th XVII Juli - September).
- Hindra, Eka dan Koichi Kimura., 2007. "Memoye: Mereka Memanggilku". (Jakarta, Esesnsi).
- Idris, Rabihatun., dkk., 1983. "Peranan Wanita di Sulawesi Selatan dalam Menentang Penjajahan Asing". Makalah pada Seminar Sejarah Perjuangan Rakyat Sulawesi Selatan Menentang Penjajahan Asing, di Ujung Pandang 1982. Jakarta: Depdikbud.
- Indonesia Timur: 9 Maret 1949, 7 Oktober 1949 (Koleksi Perpustakaan Nasional Salemba, Jakarta).
- Kongres Wanita Indonesia (Kowani)., 1978. "Sejarah Setengah Abad Pergerakan Wanita Indonesia". (Jakarta: Balai Pustaka).
- Laporan Politik Tahun 1951-1953, Arsip Provinsi Sulawesi 1946-1960 (Rahasia), No.Reg. 232, 234, dan 703 (Koleksi Kantor Arsip Propinsi Sulawesi Selatan).
- Lasmidja, Hardi., 1984. "Kumpulan Pengalaman dan Pemikiran" (Jakarta: Sinar Harapan).
- Lembaga Sejarah Kodam XIV/Hasanuddin, "Riwayat Perjuangan Mulyati Hasyim" (Ujung Pandang, 1978).
- Madjalah Karya : Menuju Kemerdekaan dan Kemajuan Wanita Th. 1 no.2 (1947. T.h. 5 no.7 (1951) . Jakarta : Badan Penerbit Karya Martacoa 1947-1951), No. Reg, B. 3520. (Jakarta, Perpustakaan Nasional).

Madjalah Karya, 1945-1960 (Koleksi Perpustakaan Nasional Gambir, Jakarta).

Majalah Wanita, "Dari Kongres Wanita Indonesia", no. 3, Th. XIV, 15 Februari 1961.

Mappangara, Suriadi., 2005. "Wanita dalam Sejarah Perjuangan di Sulawesi Selatan". (Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Makassar).

Marhaen: 25 Agustus 1953, 8 Juni 1954, 10 Maret 1955. (Koleksi Perpustakaan Nasional Salemba, Jakarta).

Maryam, Sitti., 2009 . "Salawati Daud dan Gagasan Tentang Persatuan Nasional Indonesia: Sebuah Biografi Politik, 1909-1985". Tesis, Pasca Sarjana Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Mawar, Irmawati Puan., 2018. Emmy Saellan Perempuan di Palagan. Jakarta Timur. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Jalan Daksinapati Barat IV.

Mekar : Madjalah Bulanan untuk Wanita No. 1 (1954), No. 10 (1954) Djakarta : Persit. 1954. 8 Jilid. No. Reg B: 3974. . (Jakarta, Perpustakaan Nasional).

Merdeka: Agustus dan September 1945 (Koleksi Perpustakaan Nasional Salemba, Jakarta).

Mukmin, Hidayat., 1981. "Beberapa Aspek Perjuangan Wanita di Indonesia" suatu pendekatan Deskriptif – Komparatif dan Nilai Tradisional Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional. Jakarta. (Perpustakaan ARSIP Nasional, Jakarta).

Nana, Nurliana., 2001 "Peranan Wanita Indonesia di Masa Kemerdekaan (1945-1950), Jakarta, Depdikbud.

Nusantara: 3 September 1950, 4 September 1950, 30 Oktober 1950. 6 dan 29 Nopember 1950, 2 Desember 1950, 3 Januari 1951, 3 Februari 1951, 23-27 Februari 1951, Maret 1952, Desember 1953 (Koleksi Perpustakaan Nasional Salemba, Jakarta).

Pawiloy, Sarita., 1987. "Sejarah Perjuangan Angkatan 45 di Sulawesi Selatan". Ujung Pandang: Dewan Harian Daerah Angkatan 45 Propinsi Sulawesi Selatan.

- Pedoman Rakjat: 9 April 1952, 18 Oktober 1954, 14 Maret 1955. (Koleksi Perpustakaan Nasional Salemba, Jakarta).
- Pedoman Wanita: 10 Juli 1958, Desember 1958, Maret, 25 April 1960, Juni 1960, (Koleksi Perpustakaan Nasional Salemba, Jakarta).
- Politiek verslag van het gouverneur Celebes en onderhoorigheden over het 1e halfjaar 1934. Lijst van de Politieke verslagen seri 4e, Reel 6, Mr. 1934, bundel 3 (Koleksi ANRI, Jakarta).
- Politiek verslag van het gouverneur Celebes en onderhoorigheden over het 1e halfjaar 1935. Lijst van de Politieke verslagen seri 4e, Reel 7, Mr. 1935, bundel 4 (Koleksi ANRI, Jakarta).
- Post, Peter., 2010. *The Encyclopedia of Indonesia in the Pacific war: in Cooperation with the Netherlands Institute for War Document* (Boston).
- Pradadimara, Dias. dkk., 2014 “Negara Masyarakat Sulawesi Selatan di Tahun 1950-an”. PT Kanisius.
- Pradadimara, Dias., 2004. “Dari Makassar ke Makassar. proses “Etnisasi” Sebuah Kota”, dalam Dias Pradadimara dan Muslimin A.R. Effendy (Ed.), *Kontinuitas dan Perubahan dalam Sejarah Sulawesi Selatan* (Yogyakarta: Ombak).
- Pradadimara, Dias., 2019. “Perempuan dan Perspektif Gender dalam Penulisan Sejarah Indonesia”. (Lensa Budaya, Vol.14, No. 1).
- R.Z, Leirissa. 1989. “Pemikiran Tentang Sumpah Pemuda”, (Jakarta.ISDN).
- Ricklefs, M.C., 2005. “Sejarah Indonesia Modern 1200-2004”. Jakarta: Serambi.
- Sadli, Sapparinah., 2010. “Berbeda Tetapi Setara: Pemikiran Tentang Kajian Perempuan, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas).
- SOBSI. Kementerian Penerangan. (Perbaiki tingkat Hidup Buruh Wanita dan Hapuskan Diskriminasi di Segala Bidang) No. Reg. 225. (Koleksi ANRI, Jakarta).

- Sondarika, Wulan., 2017. "Peranan Wanita Dalam Perjuangan Kemerdekaan Indonesia Pada Masa Pendudukan Jepang" (Ciamis: Program Pendidikan Sejarah FKIP Universitas Galuh, Jurnal HISTORIA Volume 5, Nomor 2, Tahun 2017, 2337-4713 (e-ISSN 2442-8728).
- Suharti, Retno., 1995. "Gender dan Permasalahannya" (Buletin Psikologi)", Tahun III, Nomor 1, Agustus. ISSN: 0854-7106.
- Sulawesi : Madjalah Kebudayaan Th. 1 No. 1 (1958), Th. 1 No.8 (1959) Makassar: "Antar Nusa" (1958-1959) No. Reg B: 3962. (Jakarta, Perpustakaan Nasional).
- Surat Kabar Antara, 1 dan 5 September 1950, 4,8,11 Januari 1951, 1 dan 3 Februari 1951, (Koleksi Perpustakaan Nasional Salemba, Jakarta).
- Susanto, S.J, Budi., 2003. "Politik Postkolonialitas Di Indonesia". (Kansius).
- W. Pranoto, Suhartono., 2001. "Revolusi Agustus: Nasionalisme Terpasung dan Diplomasi Internasional". (Yogyakarta, Laper Pustaka Utama).
- Wanita : Untuk Ibu, Istri dan Wanita Indonesia dalam Rumah Tangga Th. 1 No. 1 (1949) Th. 18 No. 7 (1965) Djakarta. No. Reg B: 3595. . (Jakarta, Perpustakaan Nasional).
- Wanita Sedar: Madjalah Resmi Tengah Bulanan dari Pengurus Besar "Gerakan Wanita Indonesia Sedar (Gerwis)) Th. 1 no. 14 (1951). Jogyakarta : Sekertariat Penerangan (Pendidikan P.B Gerwis 1951). No.Reg. B. 1466 (Koleksi Perpustakaan Nasional, Jakarta)
- Wanita, "Dari Kongres Wanita Indonesia" , No. 3, Th. XIV, 15 Februari, 1961. . (Jakarta, Perpustakaan Nasional).
- Wanita: (1957-1965). No. Reg. 3595. 1960. (Jakarta, Perpustakaan Nasional).
- Wieringa, Saskia E., 1998. "Kuntulanak Wangi: Organisasi-Organisasi Perempuan Indonesia Sesudah 1950" (Jakarta: Kalyanamitra).
- Wieringa, Saskia E., 1999. "Penghancuran Gerakan Perempuan" (Jakarta. Garba Budaya).
- Wijayanti, Winna., 2017. "Kongres Wanita Indonesia ke-XII Dan Pengaruhnya Terhadap Gerakan Wanita Di Indonesia Tahun 1961-1964". Jurnal Student, UNJ, Vol 2. No. 4.